



KINI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KALTIM BISA PUNYA SIM



**DI HARI MERDEKA,
CAFE DI BALIKPAPAN DIBOBOL MALING**



Pelaku pencurian tabung gas 12 kg di salah satu cafe di Kota Balikpapan tertangkap kamera CCTV.

DI HARI MERDEKA, CAFE DI BALIKPAPAN DIBOBOL MALING

BALIKPAPAN - Salah satu tempat tongkrongan atau cafe di Kota Balikpapan menjadi sasaran aksi kejahatan pencurian oleh orang tak dikenal pada Kamis (17/8/2023) sekitar pukul 10.30 WITA.

Slalu Coffee yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota dibobol maling. Pintunya dibongkar dan tabung gas 12 kg pun lenyap dibawa kabur pelaku yang terlihat dari rekaman CCTV.

Pemilik Slalu Coffee, Ajeng (21) baru menyadari bahwa warungnya telah dibobol saat hendak membuka toko pada sore harinya. Saat ia tiba di cafe, ia melihat bahwa pintu toko telah terbuka dan tabung gas 12 kg telah hilang.

"Kita sadarnya itu sore kemarin pas mau buka, kok pintu itu sudah terbaring. Terus kita cek tabungnya itu sudah nggak ada," ujar Ajeng, Jumat (18/8/2023).

Ajeng kemudian memeriksa rekaman

CCTV dan melihat bahwa seorang pria telah masuk ke dapur sekitar pukul 10.30 WITA. Memang pada saat kejadian, sekitar tempat usaha miliknya dalam kondisi sepi.

Lebih lanjut pria tersebut merusak kunci pintu dan masuk ke dapur Slalu Coffee. Ia kemudian mengambil tabung gas 12 kg dan melarikan diri mengenakan sepeda motor.

"Dia kayak tahu kalau di situ ada tabung gas, jadi mungkin udah dipantau dari lama. Jadi dia langsung masuk dapur," tambahnya.

Dirinya menambahkan, pelaku hanya mengambil tabung Elpiji saja. Ajeng menduga, pelaku merupakan spesialis pencurian tabung Elpiji. Atas kejadian ini, Ajeng pun berencana melaporkannya ke pihak kepolisian.

"Nunggu bapak saya pulang kalau mau lapor polisi. Nunggu saran dari beliau," tutup Ajeng. **(bom)**



Dirlantas tinjau penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Polresta Balikpapan.

KINI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KALTIM BISA PUNYA SIM

BALIKPAPAN - Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan memantau langsung proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Satlantas Polresta Balikpapan, Jumat (18/8/2023).

Sonny mengatakan, penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan kemudahan saat melakukan pengurusan SIM.

"Kita bantu prosesnya tetap mempermudah, tapi tidak mengurangi kualitas kompetensi pengemudi," ujarnya.

Sonny menjelaskan, dalam proses pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu akan dilakukan pelayanan yang sama prosesnya dengan masyarakat pada umumnya. Hanya saja, petugas yang melayani

mereka telah diberikan pelatihan bahasa isyarat beberapa hari sebelumnya, untuk bisa berkomunikasi dengan para penyandang tuna rungu yang melakukan permohonan penerbitan SIM.

"Masing masing loket menggunakan bahasa isyarat mulai dari administrasi sampai proses pemotretan ujian teori sampe dengan ujian praktek," jelasnya.

Sonny menambahkan, penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu ini selain sebagai bentuk komitmen polri, juga untuk memfasilitasi mereka (tuna rungu) yang telah berkendara selama beberapa tahun tanpa dilengkapi SIM.

Untuk itu, pihaknya pun melakukan pelayanan jemput bola dengan mengajak para tuna rungu untuk melengkapi SIM saat berkendara di jalan umum.

"Tadi ada yang sudah 5 tahun bahkan 9 tahun, paling sedikit 5 tahun, mereka (tuna rungu) belum memilik SIM, nah ini kan

sangat ironi sekali jadi kami dari jajaran Ditlantas Polda Kaltim sesuai dengan arahan bapak kapolri, yaitu presisi kita jemput bola," tambahnya.

Penerbitan SIM bagi tuna rungu ini juga, lanjut Sonny, merupakan inovasi atau terobosan yang dilakukan kepolisian dengan berkolaborasi dengan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) di Kaltim untuk menggandeng penyandang disabilitas tuna rungu di Kaltim agar dapat tertib berlalu lintas.

Penyandang tuna rungu yang telah mendapatkan SIM juga nantinya akan diberikan tanda berupa sticker pada kendaraannya. Agar, petugas yang menemukan pelanggaran lalulintas di jalan bisa mengetahui kondisi pengemudi tersebut.

"Harapannya kami polri khususnya Ditlantas Polda Kaltim hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat," tutupnya. **(bom)**



**KEJARI PENAJAM PANTAU
PELABUHAN PENDUKUNG
PENGIRIMAN MATERIAL & LOGISTIK IKN**



Tongkang atau ponton bermuatan material di Pelabuhan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan khusus bongkar muat material dan logistik pembangunan Kota Nusantara (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

KEJARI PENAJAM PANTAU PELABUHAN PENDUKUNG PENGIRIMAN MATERIAL DAN LOGISTIK IKN

PENAJAM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memantau sejumlah pelabuhan di daerah berjuduk Benuo Taka itu, yang ditetapkan sebagai pendukung pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara, sebagai ibu kota negara baru Indonesia.

"Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi pelabuhan pendukung distribusi material dan logistik Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelas Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Abram Nami Putra Tambunan di Penajam, Jumat (18/8/2023).

Inventarisasi dan identifikasi sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Agung untuk mendukung kelancaran pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara pada sebagian Kabupaten Penahan Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kementerian Perhubungan (Kemenuh) menerbitkan rekomendasi melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyangkut pemberian izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai untuk kegiatan bongkar muat material dan logistik pembangunan Kota Nusantara jalur laut.

Sebanyak 14 pemegang izin penggunaan garis pantai untuk kegiatan pelabuhan bongkar muat material dan logistik khusus pembangunan ibu kota negara baru Indonesia tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Izin 14 pemegang garis pantai sudah diterbitkan Kemenuh untuk menggunakan garis pantai melakukan bongkar muat material dan logistik khusus IKN," katanya.

Izin penggunaan garis pantai yang dikeluarkan Kemenuh tersebut terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Kementerian PUPR dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kejaksaan negeri melaku-

kan pantauan terhadap 14 pemegang izin penggunaan garis pantai, kata dia, karena izin yang diterbitkan Kemenuh itu hanya untuk kepentingan pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara.

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara bakal menindak tegas pemilik izin pelabuhan apabila terindikasi melayani bongkar muat selain untuk material dan logistik kebutuhan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia.

"Izin pelabuhan hanya boleh melayani bongkar muat material dan logistik IKN, tidak boleh digunakan di luar kepentingan IKN dan kalau ditemukan digunakan bukan untuk IKN akan ditindak tegas," ujarnya.

Kejari Penajam Paser Utara juga memantau pelabuhan terhadap gangguan dari oknum tidak bertanggung jawab, persaingan usaha kurang sehat, serta mafia tanah dan pelabuhan, demikian Abram Nami Putra Tambunan. **(Ant/MK)**



Petugas memadamkan api secara manual saat karhutla di Petung, Kabupaten PPU, Kamis (17/8/2023).
ANTARA/HO-BPBD Kabupaten PPU

TIM GABUNGAN BERHASIL PADAMKAN KARHUTLA DI PETUNG

PENAJAM - Tim gabungan dari berbagai unsur di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023), berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan RT 16, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam.

"Tadi kami kolaborasi dengan berbagai pihak melakukan penanganan sehingga api bisa dipadamkan meski sangat sulit karena berbagai kendala," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU Budi Santoso di Penajam, Kamis (17/8/2023).

Sejumlah unsur yang tergabung dalam pemadaman karhutla tersebut antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres PPU, Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabin) Dinas Pertanian Kabupaten PPU.

Kobaran api pertama kali diketahu-

hui oleh Kabag Ops Polres PPU pukul 14.19 WITA dan langsung dilaporkan kepada tim, termasuk ke BPBD Kabupaten PPU sehingga langsung mendapat penanganan dari berbagai unsur. Awal kebakaran diperkirakan satu jam sebelumnya.

Saat tim gabungan sampai di lokasi, api masih berkobar. Faktor kesulitan yang dihadapi tim antara lain lokasi karhutla tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda empat, sehingga mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk.

Selain itu, titik api tersebar di beberapa lokasi karhutla, lokasi karhutla jauh dari sumber air, saluran primer di RT 16 dan beberapa saluran sekunder di lokasi yang dekat cadangan airnya mulai mengering.

"Jalan masuk hanya menggunakan kendaraan roda dua dan berjalan kaki dengan jarak cukup jauh, sekitar 2 kilometer, sehingga pemadaman dilaku-

kan dengan cara manual dan menggunakan mesin portabel yang juga agak sulit mencari sumber air," katanya.

Pukul 18.30 WITA, lanjut dia, pemadaman dan pendinginan selesai dilakukan dan selanjutnya tim gabungan kembali ke pos masing-masing. Sedangkan area yang terbakar diperkirakan sekitar 8 hektare, namun akan dilakukan penghitungan ulang.

Material yang terbakar merupakan semak belukar dan gambut tipis, sehingga ia mengimbau semua pihak untuk selalu waspada dan saling mengingatkan agar tidak sembarang melakukan pembakaran, karena pada musim kemarau ini banyak daun dan ranting kering.

Personel di lapangan dalam mitigasi karhutla ini berasal dari BPBD, Satpol PP, Distan, Brigade Karhutla, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Polres, Dinas Pemadam Kebakaran Pos Petung, dan warga. **(Ant/MK)**



Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Budi Santoso.
ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

BPBD PENAJAM PADAMKAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT 20 HEKTARE DI 10 LOKASI

PENAJAM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berhasil mengatasi kebakaran pada lahan gambut di 10 lokasi dengan total luasan 20 hektare di daerah berjuduk Benuo Taka itu.

"Kami bersama sejumlah pihak terkait berhasil lakukan pemadaman pada 10 kasus kebakaran hutan dan lahan selama dua bulan terakhir dengan luas mencapai 20 hektare," jelas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara Budi Santoso di Penajam, Jumat (18/8/2023).

Kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Penajam, karena mayoritas lahan di wilayah itu merupakan lahan gambut yang mudah terbakar.

"Kebakaran hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan, terbesar dengan luas delapan hektare terjadi di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam pada Kamis (17/8)," tambahnya.

Peralatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih aman dan mencukupi, serta jumlah personel juga

memadai untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Kendala saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah akses menuju lokasi kebakaran tidak bisa dilalui kendaraan bermotor sehingga harus ditempuh berjalan kaki dengan membawa peralatan

Kemudian di lokasi kebakaran hutan dan lahan sumber air menipis atau tidak ada sumber air yang dibutuhkan untuk pemadaman, sehingga pemadaman dilakukan secara manual dengan membuat sekat mengelilingi api.

BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan instansi terkait juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat.

Masyarakat dan perusahaan diingatkan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta meminta warga agar tidak membuang puntung rokok di lahan yang mudah terbakar, karena pada saat musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran, demikian Budi Santoso. **(Ant/MK)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR KUKAR

EDISI SABTU
19 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



Kukar Bersholawat & Kukarland Festival 2023,
UNDANG 8 ARTIS IBU KOTA





Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Istimewa)

DPRD KUKAR MINTA PEMPROV KALTIM SEGERA TINDAK LANJUTI LONGSOR DI MARGASARI

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, ikut menyoroti musibah longsor di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, yang sebabkan satu bangunan bengkel runtuh ke Sungai Mahakam. Pada Kamis (10/8/2023) lalu.

"Mungkin menindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat kepada kami, bahwa terjadinya musibah tanah longsor yang ada di Jembayan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama Pemerintah Kabupaten Kukar," ujar Rasid.

Diketahui, bencana tanah longsor tersebut posisinya tepat berada di samping Jalan Poros Tenggarong - Loa Janan. Bahkan, menurut informasi yang didapat olehnya, tanah yang berada di bawah jalan utama yang menghubungkan Tenggarong - Loa Janan tersebut tanahnya berongga atau kosong.

"Kemarin kita sempat sidak kesana, memang disampaikan warga bahwa di bawah

dari pada jalan itu pada saat dilakukan pengeboran kosong," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ia pun meminta agar dinas terkait yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menindaklanjutinya.

"Mudah-mudahan dinas terkait yang ada di provinsi secepatnya menindaklanjuti ini, supaya tidak terlalu banyak korban rumah yang ada disitu," sebutnya.

Pemerintah desa setempat juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan Pemkab soal kondisi tanah usai terjadinya longsor tersebut. Sehingga, Pemkab Kukar bisa cepat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kejadian yang serupa.

"Kita koordinasikan dengan pemerintah daerah kalau memang benar disitu rawan longsor. Tentunya pemerintah daerah harus cepat mengambil tindakan, supaya tidak ada kejadian lagi yang seperti itu," pungkasnya. **(adv/afi)**



Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. (Rafi'i/Media Kaltim)

APBD NAIK RP 11,8 TRILIUN, PEMKAB KUKAR FOKUS KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH & STUNTING

TENGGARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, mewanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan realisasi belanja yang sudah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran. Ini dilakukan mengingat nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Perubahan yang meningkat hingga Rp 11,8 triliun.

Ini sesuai proyeksi APBD Perubahan Kukar 2023, yang belum lama ini ditetapkan bersama DPRD Kukar. Meningkat dari angka Rp 7,78 triliun menjadi Rp 11,8 triliun, atau naik sekitar Rp 4 triliun lebih.

"Semua OPD wajib memaksimalkan belanjanya, agar tidak Silpa. Supaya ketika sudah dianggarkan bisa segera dibelanjakan, itu misi utama kita," ungkap Rendi, Kamis (17/8/2023) malam.

Tentunya dengan kenaikan nilai APBD Perubahan Kukar 2023 ini, ikut mengerek alokasi belanja untuk beberapa OPD. Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik-

bud) Kukar, serta belanja pegawai. Di mana ada total 3 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang harus digaji.

Termasuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar. Yang memang memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan. Peningkatan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa yang memang masih jadi prioritas Pemkab Kukar ditahun 2023 ini. Di samping pembangunan jalan desa dan lingkungan.

Belum lagi pekerjaan rumah Kukar dalam proses pengentasan kemiskinan ekstrem di Kukar. Di dalamnya juga terdapat pengentasan kemiskinan yang sama-sama menjadi program prioritas secara nasional.

"Setiap OPD juga menganggarkan sesuai wilayahnya masing-masing, untuk pengentasan kemiskinan dan stunting. Artinya anggaran stunting secara nasional itu jadi prioritas kita di (APBD) perubahan 2023 dan murni 2024," tutup Rendi. (afi)



Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, saat Press Conference Kukar Bersholawat dan Kukarland Festival 2023. (Istimewa)

Kukar Bersholawat & Kukarland Festival 2023, UNDANG 8 ARTIS IBU KOTA

TENGGARONG - Dua event besar dipastikan akan memeriahkan Road to Erau Adat Kutai dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kota Tenggara ke-241, pada September mendatang. Yakni Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan menyelenggarakan Kukar Bersholawat dan Kukarland Festival 2023.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menjelaskan acara yang digelar bersama seluruh dunia usaha yang beroperasi di Kukar ini, akan terfokus di Halaman Kantor Bupati Kukar. Di mana Kukar Bersholawat akan diselenggarakan terlebih dahulu pada Jumat (8/9/2023) mendatang. Dipimpin langsung oleh pimpinan Majelis Sholawat Az-Zahir, Habib Ali Zainal Abidin atau kerap dikenal dengan Habib Bidin.

"Kukar bersholawat untuk membumikan sholawat di Kukar, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini pertama kali dalam event besar, akan ada dua kali setahun ini," ujar Rendi, Ka-

mis (17/8/2023) malam.

Agenda puncaknya, yakni Kukarland Festival 2023 yang rencananya akan digelar di tempat yang sama, Halaman Kantor Bupati Kukar. Pada 22-23 September 2023 mendatang. Tak main-main, dipastikan sebanyak 8 grup band akan menghentak pecinta musik di Kukar, Kalimantan secara umum.

Di antaranya, Potret Band, Setia Band, Tipe-X, Soegi Bornean, Maliq & D'essentials, Guyon Watson, Club Dangdut Racun dan grup musik dangdut legendaris Soneta Grup.

Tentunya ini tidak akan dikerjakan sendiri oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, namun lebih kepada kolaborasi lintas OPD. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setkab Kukar.

Hadirnya Kukarland Festival 2023 pun, diklaim orang nomor dua di Kukar itu, menjawab kerinduan warga Tenggara akan

hadirnya festival dalam skala besar. Mengingat sejumlah kecamatan sudah melakukan hal serupa. Dan festival yang bertepatan dengan Erau Adat Kutai dan HUT Kota Tenggara ke-241 ini, menjadi jawabannya.

Ini pun diklaim akan menjadi gelaran akbar di tahun 2023. Dengan menyajikan expo terbesar di Kukar. Menyiapkan 100 tenant lebih selama dua hari pelaksanaan Kukarland Festival 2023. Dengan target penonton mencapai 100 ribu orang yang akan memenuhi Tenggara, selama dua hari pelaksanaan event.

Belum lagi sektor lainnya yang akan berdampak. Tidak hanya pelaku UMKM di Kukar saja yang akan menuai, namun sektor lain seperti perhotelan pun dipastikan akan merasakan dampak dari perhelatan Kukarland Festival 2023 nantinya.

"Akan ada puluhan miliar rupiah yang berputar di Kukar, sedikit banyak akan berdampak untuk perekonomian warga Kukar," tutupnya. **(afi)**



KENAPA LOKTUAN DIPILIH JADI PILOT PROJECT KAMPUNG BERSIH NARKOBA, INI ALASANNYA!



BACA HALAMAN A2



**Tekan Angka Pengangguran,
Agus Haris Sodorkan 2 Solusi
BACA HALAMAN A6**



Peresmian Kampung Bersinar di Halaman Kantor Kelurahan Loktuan.

SYAKURAH/RADARBONTANG

Kenapa Loktuan Dipilih Jadi Pilot Project Kampung Bersih Narkoba, Ini Alasannya!

BONTANG - Polres Bontang mengadakan launching kampung bebas dari narkoba di Kelurahan Loktuan tepatnya kantor halaman kelurahan, Jumat (18/8/23).

Progam ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kampung bersih narkoba (bersinar) yang digunakan sebagai pilot project adalah Kelurahan Loktuan.

Dalam hal ini Polres Bontang juga bekerjasama dengan BNN, Kodim, seluruh perusahaan dan stakeholder untuk bekerjasama dalam menangani narkoba.

Pemilihan Kelurahan Loktuan sebagai Kampung Bersinar, selain karena berdasarkan surat edaran dari Wali Kota

Bontang, lantaran mayoritas hasil-hasil penangkapan dan pengungkapan narkoba berada di daerah tersebut.

Sesuai dengan rilisan Sat Resnarkoba Polres Bontang sampai pada 16 Agustus 2023, polisi berhasil menangani 49 kasus dengan 69 tersangka. Dengan Barang bukti antara lain berupa sabu seberat 1479,19 gram, ekstasi 8,6 gram, tembakau sintesis 10,98 gram.

"Walaupun ini pilot project, tapi nantinya kita akan membentuk satgas-satgas anti narkoba di seluruh kelurahan," jelas Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya.

Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan, kebanyakan warga binaan di lapas adalah seorang pelaku narkoba.

"Sekitar 80 persen ibu-ibu di lapas merupakan pelaku narkoba, sama halnya dengan yang ada di Polres, sekitar 70 persen itu kasus narkoba," bebernya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa memerangi narkoba merupakan hal yang sulit, sehingga walaupun tidak bisa memusnahkan setidaknya jumlahnya harus ditekan, agar persentase kasus narkoba di Bontang berkurang.

Cara kerja pemberantasan juga harus dilakukan secara serentak dan berkesinambungan, agar tidak ada celah. Karena jika bekerja hanya karena beberapa tahun kemudian ada jeda, kasus narkoba akan bisa naik kembali.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



SYAKURAH/RADARBONTANG

Pelantikan satgas anti narkoba di Halaman Kantor Kelurahan Loktuan.

Satgas Anti Narkoba Dilantik, Partisipasi Masyarakat Tetap Dibutuhkan untuk Melaporkan Pengguna

BONTANG - Pelantikan Satgas (satuan tugas) Anti Narkoba di Kelurahan Loktuan dilaksanakan di halaman Kelurahan Loktuan, Jumat (18/8/2023). Pelantikan satgas tersebut dalam rangka menjadi pilot project pemerintahan menekan kasus narkoba.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya mengatakan, pada tahun 2021 lalu, satgas anti narkoba sudah pernah dibentuk dan selama beberapa tahun mengalami penurunan.

"Dilihat dari tahun 2021 sampai 2022 memang terdapat penurunan preventif, sehingga kami mencari strategi baru lagi untuk membentuk keterlibatan oleh seluruh tokoh masyarakat,"

jelasnya.

Yusep menjelaskan, masyarakat masih takut untuk melaporkan pelaku narkoba. Padahal jika ada peran aktif dari masyarakat untuk melapor sebelum polisi menangkap, polisi akan merekomendasikan untuk melakukan rehabilitasi dengan pengawasan tokoh masyarakat.

"Dengan melibatkan masyarakat, bisa menumbuhkan kepedulian dan tidak memandang pecandu sebagai sesuatu yang menyeramkan," bebernya.

Hanya pelaporan pengguna narkoba yang akan direhabilitasi, untuk bandar dan jaringan akan tetap dijerat dengan proses hukum.

Wali Kota Bontang, Basri Rase menambahkan, saat menjadi satgas anti narkoba tentu setidaknya mereka harus mengetahui jenis-jenis serta ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Ilmu-ilmu dasar harus dimiliki.

"Nantinya para satgas akan diberikan pengetahuan-pengetahuan dan bimbingan, bisa dari Bhabin atau Bhabinkamtibmas," ucapnya.

Ia juga berterima kasih kepada BNN karena telah membantu pemkot untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada seluruh dinas, demi lingkungan kerja yang produktif bebas narkoba.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



DPRD KOTA BONTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Panasnya Rapat Paripurna: Ketua DPRD 'Semprot' Kadis Sering Mangkir Rapat Dewan

BONTANG – Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023) sore tadi berlangsung 'panas.' Anggota DPRD Bontang geram dengan OPD dan lurah yang sering mangkir saat ada panggilan rapat dari dewan.

Ungkapan kekecewaan tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Atos sapaan akrabnya mengeluhkan sering mengundang OPD terkait untuk menanyakan proses pekerjaan namun jarang yang hadir.

"Kurang lebih 5-6 kali kami mengundang tidak pernah hadir. Melalui rapat yang terhormat ini dapat kami tegaskan agar dapat menghargai kami sebagai Anggota DPRD. Kami ingin kerjasama yang baik," ujarnya.

Pernyataan tersebut lalu ditimpali oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Andi Faiz pun 'menyemprot' para OPD yang hadir. Ia menegaskan kalau kedudukan Anggota DPRD dengan wali kota itu sejajar berdasarkan undang-undang.

"Tolong perlakuan kalian kepada pimpinan kalian itu juga perlakukan kepada kami. Berkali-kali kami mengundang rapat, OPD-OPD pun tidak pernah datang," ungkapnya.

Ia mengatakan, kalau sampai kepala dinas terkait tidak datang pada saat pembahasan mitra kerja masing-masing untuk pembahasan APBD perubahan, ia akan menyalahkan pemerintah kalau pembahasan ini gagal atau terlambat.

"Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak. Waktu kita tidak banyak. Uang Rp 700 M mau dihabiskan di waktu 3 bulan itu saya tidak tau berapa banyak silpanya tahun depan. Kalau lepas tahapan-tahapan kita sekarang ini kalau

cuma gara-gara itu sangat disayangkan," bebernya.

Dirinya juga menyindir adanya 'lurah politis.' Kalau bertemu anggota dewan selalu bicara 'warna.' Menurutnya di pemerintahan ini bukan warna, bukan politik, tapi pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakannya, serapan anggaran pemerintah daerah sampai hari ini di prognosis 6 bulan pertama hanya 30 persen. Masih ada 70 persen yang belum terserap di hampir semua OPD. Ditambah lagi Rp 300 Miliar di anggaran perubahan.

"Terbayang gak silpanya. Jangan cuma nafsu mau masukkan anggaran tapi harus realistis," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini kembali mengingatkan jangan sampai hal tidak penting seperti ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan DPRD. Agar hubungan keduanya lebih baik lagi ke depannya.

Sementara itu Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya jangan sampai keluhan tersebut menggeneralisir semua OPD. Karena tidak semua OPD seperti itu. Jangan sampai satu dinas yang berlaku buruk dapat merusak yang lain.

"Tidak semua kepala dinas seperti itu," ujarnya.

"Saya akan panggil semuanya. Saya akan beri peringatan terkait hal itu. Saya akan tegur," tegasnya.

Basri pun juga mengingatkan kepada DPRD agar sistem penganggaran sekarang ini juga harus disikapi dengan baik. Artinya melalui semua tahapan-tahapan dari awal.

"Saya minta kepada DPRD dalam hal menyusun anggaran, kita harus sesuai aturan juga. Sama-sama kita mengatur. Jangan sampai anak buah saya diserahkan dalam hal ini. Kita semua punya forum. Saya juga punya forum,"

pengkasnya. (adv/al) BONTANG – Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023) sore tadi berlangsung 'panas.' Anggota DPRD Bontang geram dengan OPD dan lurah yang sering mangkir saat ada panggilan rapat dari dewan.

Ungkapan kekecewaan tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Atos sapaan akrabnya mengeluhkan sering mengundang OPD terkait untuk menanyakan proses pekerjaan namun jarang yang hadir.

"Kurang lebih 5-6 kali kami mengundang tidak pernah hadir. Melalui rapat yang terhormat ini dapat kami tegaskan agar dapat menghargai kami sebagai Anggota DPRD. Kami ingin kerjasama yang baik," ujarnya.

Pernyataan tersebut lalu ditimpali oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Andi Faiz pun 'menyemprot' para OPD yang hadir. Ia menegaskan kalau kedudukan Anggota DPRD dengan wali kota itu sejajar berdasarkan undang-undang.

"Tolong perlakuan kalian kepada pimpinan kalian itu juga perlakukan kepada kami. Berkali-kali kami mengundang rapat, OPD-OPD pun tidak pernah datang," ungkapnya.

Ia mengatakan, kalau sampai kepala dinas terkait tidak datang pada saat pembahasan mitra kerja masing-masing untuk pembahasan APBD perubahan, ia akan menyalahkan pemerintah kalau pembahasan ini gagal atau terlambat.

"Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak. Waktu kita tidak banyak. Uang Rp 700 M mau dihabiskan di waktu 3 bulan itu saya tidak tau berapa banyak silpanya tahun depan. Kalau lepas tahapan-tahapan kita sekarang ini kalau



YUSVA ALAM

Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023).

cuma gara-gara itu sangat disayangkan," bebarnya.

Dirinya juga menyindir adanya 'lurah politis.' Kalau bertemu anggota dewan selalu bicara 'warna.' Menurutnya di pemerintahan ini bukan warna, bukan politik, tapi pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakannya, serapan anggaran pemerintah daerah sampai hari ini di prognosis 6 bulan pertama hanya 30 persen. Masih ada 70 persen yang belum terserap di hampir semua OPD. Ditambah lagi Rp 300 Miliar di anggaran perubahan.

"Terbayang gak silpanya. Jangan cuma nafsu mau masukkan anggaran tapi harus realistis," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini kembali mengingatkan jangan sampai hal tidak penting seperti ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan DPRD. Agar hubungan keduanya lebih baik lagi ke depannya.

Sementara itu Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya jangan sampai keluhan tersebut menggeneralisir semua OPD. Karena tidak semua OPD seperti itu. Jangan sampai satu dinas yang berlaku buruk dapat merusak yang lain.

"Tidak semua kepala dinas seperti itu," ujarnya.

"Saya akan panggil semuanya. Saya akan beri peringatan terkait hal itu. Saya akan tegur," tegasnya.

Basri pun juga mengingatkan kepada DPRD agar sistem penganggaran sekarang ini juga harus disikapi dengan baik. Artinya melalui semua tahapan-tahapan dari awal.

"Saya minta kepada DPRD dalam hal menyusun anggaran, kita harus sesuai aturan juga. Sama-sama kita mengatur. Jangan sampai anak buah saya diserahkan dalam hal ini. Kita semua punya forum. Saya juga punya forum," pungkasnya. (adv/al)



Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menayangkan masih banyak pengangguran di Bontang.

Tekan Angka Pengangguran, Agus Haris Sodorkan 2 Solusi

BONTANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim).

Dikatakannya, kondisi ini tidak semestinya terjadi. Mengingat Bontang merupakan pusat daerah industri dan tenaga di Indonesia.

"Bermacam zona industri semacam migas, petrokimia, dan pupuk sudah tumbuh di kota ini. Tapi sayangnya angka pengangguran masih tertinggi," ujarnya, Rabu (16/8/2023).

Salahsatu solusi yang ditawarkan Politisi Gerindra itu adalah meminta pemerintah lebih giat mengadakan program pelatihan dunia usaha atau industri, untuk meningkatkan skill atau

kemampuan masyarakat. Hal itu agar pengangguran bisa ditekan, lantaran masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

"Sebaiknya buka pelatihan, kan ada APBD. Bisa menekan angka pengangguran," timpalnya.

Solusi berikutnya yang ia tawarkan adalah menggaet investor. Upaya ini perlu gencar dilakukan gencar mengingat beberapa tahun ke depan Bontang bakal mengalami pasca migas, yang mana perusahaan besar seperti Badak LNG akan berakhir masa operasinya pada tahun 2025. Begitupun Pupuk Kaltim, kini sedang melebarkan sayapnya ke Provinsi Papua. Kebutuhan bahan dasar gas menjadi sebab dibangunnya pabrik di sana.

"Pemkot harus memikirkan itu dari sekarang. Jangan sampai angka pengangguran semakin tinggi," terangnya.

Diketahui, Kota Bontang menjadi kota yang memiliki pengangguran terbuka terbanyak di Kaltim. Tingkat pengangguran di kota industri itu mencapai 7,81 persen. Sementara pengangguran paling kecil terdapat di Penajam Paser Utara (PPU) dengan persentase 2,12 persen.

Sementara, jumlah pencari kerja mulai Januari hingga Maret 2023 berjumlah 2.015 orang dengan lapangan pekerjaan hanya tersedia untuk 365 orang. Lowongan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja di wilayah Kota Taman. (adv/al)

Berikut 3 Nama Komisiner Bawaslu Bontang Terpilih Periode 2023-2028

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengumumkan daftar calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih untuk masa jabatan 2023-2028. Pengumuman ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah melalui proses penilaian berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan, Bawaslu mengumumkan calon anggota terpilih dari beberapa provinsi, termasuk Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Dari Provinsi Kalimantan Timur, berikut daftar kabupaten dan kota yang memiliki calon anggota Bawaslu terpilih sesuai pengumuman Nomor 2sn.I/KP.01.OO/K1/08/2023 yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tertanggal 18 Agustus 2023.

Para calon anggota tersebut akan mengikuti proses pengangkatan dan pelantikan dengan menggunakan pakaian adat/daerah masing-masing di Jakarta. Rencananya pelantikan akan dilaksanakan, Sabtu, 19 Agustus 2023. (RB)

Daftar nama-nama Komisiner Bawaslu terpilih dari Kalimantan Timur

1. Kabupaten Berau:

- Ira Kencana
- Natalis Lapang Wada
- Tamjidillah Noor

2. Kabupaten Kutai Barat:

- Lourensus
- Silvester Sagor
- Tabita

3. Kabupaten Kukar:

- Fahrizal
- Hardianda
- Munir Anshory
- Sri Muliati Ningsih
- Teguh Wibowo

4. Kabupaten Kutai Timur:

- Agustinus Verdi Logo
- Aji Mashyudi
- Aswadi
- Maya Sari
- Musbah Ilham

5. Kabupaten Mahakam Ulu:

- Indra Parda Manurung
- Leonder Awang Ajaat
- Saaludin

6. Kabupaten Paser:

- Fauzan
- Firman
- Nur Khamid

7. Kabupaten PPU:

- Edwin Irawan
- Moh Khazin
- Rusmansyah

8. Kota Balikpapan:

- Agus Sudirman
- Ahmadi Azis
- Dedi Irawan
- Hamrin
- Wasanti

9. Kota Bontang:

- Aldy Artrian
- Ismail Usman
- Syahriah

10. Kota Samarinda:

- Abdul Muin
- Imam Sutanto
- Padlansyah
- Sugeng Prasetyo
- Tumenggung Udayana



**KENAIKAN GAJI ASN, SEKDA BERAU:
BERSYUKUR & JADIKAN MOTIVASI
MELAYANI MASYARAKAT SECARA MAKSIMAL**



**RUDI: PEMKAB HARUS PROAKTIF
TUNTASKAN BLANKSPOT**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong

RUDI: PEMKAB HARUS PROAKTIF TUNTASKAN BLANKSPOT

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Rudi Mangunsong mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terus aktif melakukan berbagai upaya penuntasan blankspot di Kabupaten Berau.

Dirinya juga mengapresiasi kunjungan Tim Kemenkopluhukam yang datang ke Berau belum lama ini, untuk membantu percepatan penanganan wilayah blankspot. Serta meninjau beberapa wilayah blankspot di Kecamatan Kelay.

Menurutnya, internet kini telah berubah, dari yang tadinya merupakan barang mahal yang hanya sebagian orang yang mampu mengakses. Sekarang telah mengakar di masyarakat sebagai kebutuhan dasar. Apalagi melalui internet berbagai hal bisa dilakukan mulai dari mencari ilmu, berniaga hingga bersosial.

"Sekarang zaman sudah berubah, internet jadi kebutuhan yang dicari. Misal Covid-19 kemarin, pembelajaran daring memerlukan internet. Itu bukti bahwa sekarang internet jadi barang

yang dibutuhkan banyak orang," jelasnya, Jumat (18/8/2023).

Sehingganya, dirinya meminta Pemkab Berau tidak berpuas diri. Dan tetap bergerak untuk mencari alternatif lainnya yang bisa mempercepat penghapusan blankspot di Berau.

Ketiadaan internet di beberapa wilayah di Berau cukup memberi dampak bagi pertumbuhan beberapa sektor di masyarakat. Misalnya, dengan internet, masyarakat bisa berniaga melalui toko daring, sedangkan mereka yang masih berada di wilayah blankspot akhirnya belum bisa menggapai itu.

"Dampak ke ekonomi misalnya, mereka bisa membuka toko daring yang segmen pasarnya mungkin tidak hanya Berau. Hal itu bisa dicapai dengan akses internet yang baik," jelasnya.

Rudi berharap, ketika blankspot mampu teratasi bisa memberikan keleluasaan masyarakat yang tinggal hingga wisatawan yang datang. Sebab, hampir seluruh sendi kehidupan perlu akses internet yang baik.

"Artinya, kendala yang terjadi di kampung-kampung dipedalaman dengan tidak ada akses internet sangat berpengaruh sekali dengan semua hal," ujarnya.

Meski dirinya juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Berau yang telah menyediakan layanan wifi gratis di beberapa titik. Namun, Rudi menilai itu belum maksimal. Dirinya juga menyarankan Pemkab Berau untuk bekerja sama dengan layanan provider dengan program-program yang saling menguntungkan.

"Kita sambut kunjungan tim kemarin dikomunikasikan untuk membangun, kalau perlu kita kerjasama untuk membangun," ucapnya.

Sebab, dirinya pernah membangun layanan provider melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan layanan Provider di wilayah Segah, tepatnya di Kampung Long Ayan.

"Karena saya pernah bangun provider di Segah, kerjasama dengan provider kita sewa setahun nilainya sekian. Kita harap itu bisa dilirik," ujarnya. **(mnz/dez)**



KENAIKAN GAJI ASN, SEKDA BERAU: BERSYUKUR & JADIKAN MOTIVASI MELAYANI MASYARAKAT SECARA MAKSIMAL

TANJUNG REDEB - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi PPPK, PNS serta TNI/Polri. Untuk diketahui, wacana kenaikan gaji itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengajukan RUU APBN 2024 saat rapat paripurna, Rabu (16/8). Disampaikan Jokowi, gaji ASN, TNI/Polri akan naik 8 persen dan pensiunan 12 persen pada tahun 2024 mendatang.

Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu membawa dampak positif ke daerah. Para ASN pun bergembira mendengar kabar tersebut.

Kegembiraan tersebut tentu bukan tanpa alasan, pasalnya dalam 10 tahun terakhir kenaikan gaji itu baru terjadi dua kali.

"Semestinya kenaikan gaji terjadi kurang lebih dua tahun sekali. Selain mensejahterakan masyarakat, juga untuk mengimbangi inflasi," ungkapnya, Jumat (18/8/2023).

Dia menyebut, alasan utama kenaikan

gaji itu tentu untuk lebih dapat menyejahterakan para pegawai. Terlebih hal tersebut kebijakan nasional.

"Terkait anggaran pembiayaan, kenaikan gaji itu bersumber dari dana transfer pusat. Karena itu, dari sisi pembiayaan, kenaikan gaji tersebut tidak bermasalah bagi keuangan di daerah," jelasnya.

Lebih dari itu, kenaikan dan nominal gaji yang dinaikan akan menjadi kewenangan pusat. Nominalnya juga hanya akan diketahui secara pasti jika sudah ada ketentuannya. Termasuk, sasaran kenaikan hanya untuk PNS atau juga bersama PPPK.

Terlepas dari berapa nominal yang akan diberikan, Agus secara khusus berpesan kepada para ASN agar bersyukur terhadap kenaikan gaji tersebut. Lebih dari itu, kenaikan gaji harus menjadi motivasi bagi ASN untuk bekerja secara serius dan maksimal.

"Berapapun kenaikan itu patut disyukuri. Dan tetaplah bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya. **(dez)**



**Tangkap Pengedar Narkoba di Paser,
Polisi Amankan 0,5 Gram Sabu
hinga Uang Tunai Rp 9,2 Juta**



Pelaku beserta barang bukti

Tangkap Pengedar Narkoba di Paser, Polisi Amankan 0,5 Gram Sabu hingga Uang Tunai Rp 9,2 Juta

PASER - Seorang pria berinisial S (41) warga Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang diamankan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Paser atas kepemilikan sabu yang juga diduga merupakan pengedar di wilayah setempat.

Pria itu diamankan pada pukul 18.30 WITA, Rabu (16/8/2023) di kediamannya dengan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,5 gram. Barang bukti tersebut didapati setelah petugas menggeledah rumah milik pelaku yang turut ditemukan barang bukti lainnya.

"Kami mengamankan pelaku di kediamannya. Namun yang kami temui hanya 1 paket yang kami jadikan barang bukti," kata Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi, saat ditemui diruangannya, Jumat (18/8/2023).

Adapun barang bukti lainnya yang diamankan petugas, yaitu 1 buah timbangan digital, 1 bundel plastik klip kosong, 1 buah sendok takar, 1 buah tas, 1 unit telepon genggam serta uang tunai senilai Rp 9,2 juta yang diduga hasil penjualan sabu.

"Kita temukan semuanya itu saat penggeledahan," lanjutnya.

Suradi menyebut, pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mengetahui di rumah pelaku sering dilakukan transaksi narkoba. Pelaku lalu diringkus ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 112 juncto 114 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka terancam hukuman kurungan penjara mulai dari 4 tahun hingga 20 tahun. **(bs)**



Petugas Satreskrim Polres Paser saat di TKP

JASAD BAYI LAKI-LAKI MENGAPUNG DI HALTE SUNGAI, DIDUGA HASIL ABORSI

PASER - Sosok jasad bayi baru lahir ditemukan seorang motoris perahu cepat berinisial M (31), di Halte Sungai Kandilo, Jalan Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, pada pukul 01.00 WITA dini hari, Kamis (17/8/2023).

Penemuan itu bermula, sesaat motoris hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan membawa perahunya ke Desa Rantau Panjang dari Halte Sungai. Setibanya di perahu, M melihat bayi laki-laki yang tersangkut mengambang di ranting pohon dekat halte.

Awalnya, M menduga jasad bayi itu merupakan boneka biasa. Namun, saat diperhatikan kembali, dugaan yang ia kira tepat ternyata berbeda. Akibat terburu buru hendak mengisi BBM, ia berinisiatif membawa jasad itu ke rumah keluarga terdekatnya di Desa Rantau Panjang.

"Jasad itu diangkat ke speedboat, ditaruh ke dalam kardus lalu ditutupi menggunakan bajunya dibawa ke rumah keluarganya," kata Kasatreskrim Polres Paser, Iptu Helmi Septi Saputro berdasarkan keterangan yang ia terima dari M.

Setibanya di kediaman keluarga M, petu-

gas lalu menerima informasi dan mendatangi lokasi jasad saat itu yang sudah berada di Desa Rantau Panjang. Petugas langsung melarikan jasad tersebut ke RSUD Panglima Sebaya.

Dari upaya identifikasi yang dilakukan, petugas memperkirakan jasad bayi tersebut baru berusia 7 bulan dari dalam kandungan. Diduga, jasad tersebut hasil aborsi yang dilakukan oleh seseorang yang masih dicari tahu pelakunya.

"Karena belum kaku dan membiru kemungkinan jasad itu baru dalam hitungan jam dibuang. Belum diketahui siapa orang tua dari jasad tersebut kami masih melakukan pendalaman," kata Helmi.

Saat ditemukan, telinga kiri bayi dalam kondisi rusak. Diduga hal itu disebabkan akibat gigitan ikan atau binatang air. Hingga kini, kondisi bayi tersebut kini ditempatkan di ruang jenazah RSUD Panglima Sebaya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Kaltim untuk mengidentifikasi lebih dalam terhadap jasad tersebut. Sementara, bayi direncanakan akan dimakamkan di TPU Jone. **(bs)**

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
19 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



DEWAN PERS GELAR WORKSHOP PELIPUTAN PEMILU 2024, PERAN PENTING WARTAWAN KAWAL PEMILU

**MUDA
DINAMIS
AMANAH**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





Narasumber dan peserta Workshop Peliputan Pemilu 2024 Dewan Pers saat melakukan sesi Foto bersama.

DEWAN PERS GELAR WORKSHOP PELIPUTAN PEMILU 2024, PERAN PENTING WARTAWAN KAWAL PEMILU

SAMARINDA - Dewan Pers membekali puluhan jurnalis dari berbagai media massa dalam workshop yang bertema peliputan Pemilu 2024. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Senyuir Samarinda, Jumat (18/8/2023).

Kegiatan ini bertujuan agar media menjalankan perannya memberikan edukasi melalui informasi yang proporsional sehingga terciptanya pemilu yang bisa berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan damai.

"Ya tujuannya itu, agar tidak ada perpecahan, polarisasi yang itu salah satu pemicunya biasanya karena pemberitaan, itu yang kita hindari," ujar Tenaga Ahli Dewan Pers Arif Spriyono

Arif berharap dari pelatihan pers tersebut peran pers bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat terutama saat pelaksanaan pemilihan umum secara serentak agar tidak membuat kesalahan dalam peliputan dan pemberitaan.

"Agar pers juga memahami ada koridor-koridor yang bisa jadi pegangan, dalam proses

peliputan dan pemberitaan, misalnya memperhatikan tahapan-tahapan pemilu, memperhatikan juga aturan-aturan yang dibuat oleh KPU mungkin Bawaslu dan instansi lain yang terkait," terangnya.

Dia juga mengimbau agar media pers tetap menjaga independensinya, karena pers itu bekerja untuk publik untuk memenuhi hak masyarakat atas pemberitaan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Dari situlah pemikiran pers itu harus independen," terang Arif.

Dalam acara tersebut dihadiri narasumber dari Komisioner KPU Provinsi Kaltim Mukhasan Ajib, Komisioner Bawaslu Kaltim Galih Akbar Tanjung, Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana, Ketua KPID Kaltim Irwansyah dan Litbang Kompas Bestian Nainggolan.

Diketahui, acara yang dimulai pada pukul 09:00 Wita ini banyak keseruan dalam diskusi mengenai peran pers dalam pemilu tersebut. Kemudian, acara berakhir pada pukul 15:30 Wita dan para jurnalis berkesempatan foto bareng dengan dewan pers dan narasumber. (han)

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO



RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK

DAFTAR PAKAI
KUPON
DIGITAL
GRATIS

ACARA PUNCAK HUT MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

JALAN SEHAT



LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

INFORMASI :
+62 821-5783-0863
05348943982



Paket **MAKSIMAL** Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2

Rp **90rb** nett
/pax

Paket Ber3

Rp **130rb** nett
/pax



Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE

1 pax comp.
Light Meal





Zulkifli saat dibawa polisi ke RSJD Atma Husada.

BAKAR RUMAH SENDIRI, PRIA ODGJ DIAMANKAN POLISI

SAMARINDA - Menjelang waktu istirahat di malam hari, tiba-tiba masyarakat dikejutkan adanya api yang berkobar di salah satu rumah di Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (17/8/2023) sekitar pukul 20.30 wita.

Warga setempat pun akhirnya dibuat panik dan berhamburan ke luar rumah, mengingat lokasi kebakaran ini berada di wilayah pemukiman padat penduduk.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda, Hendra AH mengatakan bahwa kebakaran itu terjadi di bagian lantai dua rumah tersebut.

Beruntungnya, kata Hendra belum sempat api membakar habis rumah tersebut, petugas telah berhasil melakukan pemadaman.

"Asal api dari lantai dua rumah itu. Ada satu orang saja yang

huni. Beruntung api cepat padam jadi tidak sampai menyebar ke rumah lain," ucap Hendra AH saat dikonfirmasi awak media, Jumat (18/8/2023).

Namun, ada yang janggal dalam peristiwa kebakaran itu. Setelah diselidiki, ternyata asal mula api dipicu oleh pemilik rumah yang sengaja membakar kediamannya sendiri.

Dugaan pembakaran rumah itu makin kuat, pasalnya saat kejadian warga juga sempat mengamankan seorang pria.

"Penyebab pasti saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian," pungkasnya.

Dikkonfirmasi terkait kebenaran pembakaran rumah ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli melalui Kapolsek Samarinda Kota, Kompol Tri Satria Firdaus juga turut membenarkan kejadian tersebut.

Bahkan, Kompol Tri juga mengungkapkan pihaknya telah

mengamankan sang pemilik rumah pasca peristiwa itu. Pria itu yakni bernama Zulkifli (48).

Meski diamankan polisi, pria berusia 48 tahun itu tak ditahan begitu saja. Lantaran, ia diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Alhasil, Zulkifli kemudian dibawa polisi menuju RSJD Atma Husada untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sudah diserahkan ke RSJD Atma Husada. Jadi masih tunggu hasil pemeriksaan di RSJD untuk menentukan langkah selanjutnya," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun, Zulkifli diduga memang sengaja membakar rumahnya sendiri. Belum diketahui apa yang membuat ia membakar rumahnya itu serta dengan apa pria berusia 48 tahun itu membakar kediamannya.

Namun, akibat peristiwa itu lantai dua rumah tersebut ludes dilalap api. **(vic)**